

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sakato Plan merupakan sistem informasi digital yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung kelancaran proses perencanaan, pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengusulan hibah oleh masyarakat atau lembaga non-pemerintah. Sistem ini membantu berbagai aspek perencanaan, termasuk perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan program perumahan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang diusulkan. Sakato Plan merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola pendataan masyarakat secara efisien dan efektif. Program ini bertujuan untuk mengefisienkan proses perencanaan, termasuk pendataan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini dirancang oleh Bapak Khairul Zaman, M.Kom, yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan sistem informasi, guna memastikan terlaksananya administrasi dan pendataan yang baik.

Sistem ini menginput berbagai sumber data, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Sistem ini memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan, Sakato Plan memudahkan proses administrasi, sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap pengusulan terekam secara digital, Sakato Plan juga mendukung integrasi perencanaan pembangunan secara

menyeluruh dan mempermudah pemantauan serta evaluasi program-program yang diusulkan.

Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, seperti kurangnya konektivitas internet, keterbatasan literasi digital, dan masalah interaktivitas. Sakato Plan juga berdampak pada pekerjaan administratif, karena tugas administratif tidak dilakukan secara fisik. Sistem ini juga mendorong adopsi teknologi dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, sistem ini juga menimbulkan risiko bagi pegawai yang kurang familiar dengan sistem digital. Meskipun bermanfaat, Sakato Plan memerlukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan implementasi yang optimal.

B. Saran

1. Peningkatan literasi digital: Disarankan agar DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan literasi digital anggota DPRD dan staf sekretariat. Hal ini akan membantu mereka memahami fitur-fitur sistem "Sakato Plan" dan memaksimalkan penggunaannya.
2. Dukungan teknis yang lebih baik: Penting untuk menyediakan dukungan teknis yang memadai, termasuk tim IT yang siap membantu pengguna dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem.
3. Evaluasi dan umpan balik pengguna: Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem "Sakato Plan" dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan antarmuka yang lebih intuitif dan responsif.

4. Integrasi dengan Proses Kerja: Disarankan agar sistem "Sakato Plan" diintegrasikan lebih baik dengan proses kerja yang ada di DPRD, sehingga pengguna dapat melihat manfaat langsung dari penggunaan sistem dalam kegiatan sehari-hari mereka.
5. Stabilitas Jaringan Internet: Mengingat pentingnya akses internet yang stabil untuk penggunaan sistem informasi, perlu ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur jaringan di lingkungan DPRD agar semua pengguna dapat mengakses sistem dengan lancar.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi sistem "Sakato Plan" dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

